



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## UPAYA REPATRIASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA KORBAN PENIPUAN DARING

**Lisbet**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[lisbet.sihombing@dpr.go.id](mailto:lisbet.sihombing@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Operasi penipuan daring (*online scam*) awalnya dijalankan di beberapa negara ASEAN seperti Kamboja, Malaysia dan Myanmar. Modus penipuan daring berbasis *Voice over Internet Protocol* (VoIP) dilakukan oleh jaringan internasional dengan memanfaatkan akses internet di negara-negara tersebut. Penipuan ini telah mengakibatkan banyak korban. Awalnya, para pelaku berpura-pura menjadi pejabat pemerintah, perusahaan asuransi, atau lembaga keuangan dengan menargetkan warga Tiongkok sebagai korban. Model penipuan lainnya adalah para pelaku mengirimkan pesan acak ke jutaan orang dengan modus pura-pura salah mengirimkan pesan. Ketika korban merespons pesan tersebut, pelaku mulai membangun hubungan baik pertemanan, bisnis bahkan sebagai pasangan dengan korban. Perlahan-lahan para korban diyakinkan untuk mulai berinvestasi dalam skema bisnis palsu. Pada tahap awal para pelaku mengembalikan sedikit keuntungan kepada korban sebagai bukti bahwa investasi tersebut adalah nyata sehingga korban menjadi percaya dan akhirnya mengirimkan kembali dana dalam jumlah yang lebih besar.

Para pelaku dalam jaringan ini sering kali merupakan korban karena mereka merupakan tenaga kerja yang diperdagangkan. Kementerian Luar Negeri mencatat lebih dari 10.000 kasus yang melibatkan persoalan Warga Negara Indonesia (WNI) sejak tahun 2020, sebanyak 1.500 kasus di antaranya merupakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Awalnya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) dibuat tertarik terhadap tawaran kerja di luar negeri karena gaji yang ditawarkan cukup tinggi. Namun, setibanya di lokasi mereka dipaksa untuk bekerja di kompleks penipuan daring dengan mencari korban dari berbagai negara.

Di Myanmar, faktor-faktor yang mendorong munculnya oknum yang menjalin hubungan dengan jaringan di pihak luar negeri untuk membangun kompleks tempat penipuan daring, antara lain: terjadinya kudeta militer pada tahun 2021 yang telah menciptakan ketidakstabilan politik regional, kuatnya pengaruh junta militer, serta mudahnya akses internet. Total sebanyak lebih dari 400 PMI telah terindikasi sebagai korban TPPO dan bekerja di pusat kegiatan penipuan daring di wilayah sekitar Kota Myawaddy, Negara Bagian Kayin, Myanmar yang turut terdampak operasi penegakan hukum oleh Pemerintah Myanmar sejak Oktober 2025.

Sebanyak 55 orang PMI telah diizinkan Pemerintah Myanmar untuk kembali ke Indonesia (repatriasi). Para PMI tersebut terdampak dari operasi penegakan hukum pada Oktober 2025 di KK Park yang merupakan markas penipuan daring. Mereka rencananya akan dipulangkan pada 8 Desember 2025 melalui lintas batas darat Myawaddy-Mae Sot. Selanjutnya mereka akan diterbangkan melalui Bangkok pada 9 Desember 2025.

Selain itu, sebanyak 180 PMI lainnya masih menunggu pemindahan ke lokasi aman sebelum proses verifikasi dan pemulangan berikutnya. Menurut Pemerintah Myanmar, kapasitas penampungan saat ini masih penuh sehingga pemindahan belum dapat dilakukan. Disamping itu, dari operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar pada 17

November 2025 di Shwe Kokko, diperkirakan lebih dari 200 PMI korban TPPO ditahan bersama dengan 1,367 warga negara asing lainnya. Jumlah ini pun dapat bertambah seiring proses identifikasi.

KBRI Yangon terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Myanmar dan pihak terkait untuk memastikan identitas, kondisi, dan percepatan pemulangan PMI. Upaya repatriasi tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah RI melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok dengan Pemerintah Myanmar dan Thailand serta pihak lainnya.

## Atensi DPR

Upaya repatriasi pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak operasi penegakan hukum di Myanmar dilakukan secara bertahap dan terukur dengan mempertimbangkan dinamika kondisi keamanan dalam negeri di Myanmar. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI dapat mendukung Kementerian Luar Negeri (KBRI Yangon) untuk bekerja sama dengan kementerian terkait lainnya dalam menangani upaya repatriasi para PMI di Myanmar agar seluruh PMI dapat kembali ke Indonesia. Selain itu, Komisi I DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat menghimbau Kementerian Luar Negeri untuk bekerja sama dengan Kementerian terkait lainnya agar memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak menerima tawaran kerja di luar negeri dari jalur yang tidak resmi.

## Sumber

kemlu.go.id, 22 November 2025;  
kompas.com, 23 November 2025; dan  
merdeka.com, 22 November 2025.

Minggu ke-4 November  
(24 s.d. 30 November 2025)



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Rafika Sari  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Edmira Rivani  
Hilma Meilani

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra R. Oktaviano  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikhah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*